

Dua Fraksi DPRD Walk Out

■ Bupati Bantah Laporan Ganda

MEMPAWAH, TRIBUN - Sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Pontianak, terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pontianak tahun 2010 hujan interupsi.

Dua fraksi, masing-masing Fraksi Rakyat Bersatu dan Fraksi Demokrat walk out. Mereka keluar ruang sidang karena data yang disampaikan bupati dalam laporannya kepada dewan tidak sinkron dengan data laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.

"Intrupsi pimpinan sidang, saya minta paripurna Penyampaian Panadangan Umum Fraksi ditunda, karena saya melihat adanya ketidak sinkronan data, antara LHP dan laporan bupati yang diberikan ke Dewan tidak sama, kami minta ini untuk diperbaiki terlebih dulu," jelas ketua Fraksi Rakyat Bersatu, Darwis SH, dalam sidang, Selasa (2/8).

Ia menjelaskan sangat ironi, jika satu lembaga setelah dilakukan audit menghasilkan laporan yang berbeda. Akibatnya, Fraksi Rakyat Bersatu tidak bisa menyampaikan pandangan umumnya karena data yang didapat mengalami perbedaan yang signifikan.

Fraksinya menemukan keganjilan dalam dua laporan yang disampaikan ke dewan, laporan realisasi anggaran yang diterima dari pemerintah Kabupaten Pontianak, dia mencontohkan Pendapatan Asli Daerah



” Tidak ada laporan ganda. Laporan ganda itu, satu lembaga menyampaikan laporan kepada lembaga lain dua versi secara berbeda.”

RIA NORSAN

Bupati Pontianak

(PAD) sampai 31 Desember 2010, Rp 14.659.381.698. Sedangkan hasil audit BPK yang disampaikan dalam bentuk LHP, Rp 15.199.582.310, dan masih ada beberapa data nominal keuangan yang tidak sama.

"Kami tidak menyampaikan pandangan umum dikarenakan datanya beda. Semuanya memiliki kekuatan hukum. Kami harus memakai data yang mana. Untuk itu diminta kepada pimpinan sidang menunda dan memberi kesempatan bupati untuk memperbaiki data. *Toh*, penundaan sidang bukan hal yang luar biasa," papar Darwis.

Dia juga menemukan perbedaan data juga realisasi laporan PDAM Mempawah, dalam penyampaian keuangan dalam satu tahun setiap tahaunnya penyampaiannya berbeda. Contoh pada 2009, Rp 132.279.660, akan tetapi sewaktu penyampaian laporan 2010, Rp 181.895.237.

"Dari pembukuan keuangan PDAM tahun 2009 yang disampaikan tahun 2009, dengan tahun 2010 ada selisih yang jauh, padahal keduanya

ini pembukuan keuangan tahun 2009, hanya penyampaiannya berbeda. Ini sangat janggal sekali, selisihnya Rp 50 juta lebih, beda halnya kalau pembukuan di tahun berbeda, misalnya tahun 2009 dan tahun 2010," kata Darwis sambil menunjukkan buku laporan PDAM kepada *Tribun*.

Anggota fraksi lainnya, Tri Margono, menduga eksekutif membuat laporan APBD ganda, yang di audit pemerintah dan yang diaudit BPK. "Kalau APBD satu berkas yang sama, tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini ada kemungkinan APBD ganda. Sehingga apa yang disampaikan ke eksekutif dan BPK berbeda," jelas Margono.

Widdiansyah, Sekretaris Fraksi Demokrat, juga menyalskan selisih angka keuangan. "Dalam laporannya wajar dengan pengecualian, semestinya diubah juga dengan wajar tanpa pengecualian. Sehingga hasilnya dapat dikatakan baik. Dengan adanya perbedaan atau selisih angka yang dewan temukan, ini jelas menimbulkan kecurigaan bagi kami selaku dewan," kata Widdiansyah.

Ketua Sidang Rusli Abdillah, didampingi H Amin, terus melanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi. Sebab empat fraksi lainnya, PDIP, Golkar, PPP, dan Pemuda Pembaharuan Keadilan Bangsa (PPKB), tetap menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Demokrat dan Fraksi Rakyat Bersatu kemudian meninggalkan ruang sidang.

Bupati Ria Norsan, membantah tuduhan laporan APBD ganda. Ia menegaskan itu hanya perbedaan data antara laporan eksekutif dengan hasil pemeriksaan BPK. "Tidak ada laporan ganda. Laporan ganda itu, satu lembaga menyampaikan laporan kepada lembaga lain dua versi secara berbeda. Ini kan dua lembaga yang melakukan audit. Sehingga hasilnya berbeda, kalau datanya datanya beda, itu benar. Makanya dibahas dengan mendengarkan pandangan fraksi DPRD. Kalau sudah benar, *ngapain* dibahas," papar Ria Norsan.

Ria Norsan mengakui dari perbedaan versi tersebut kebenaran data keduanya masih belum diketahui, dan eksekutif akan melakukan perbaikan. "Kita belum tahu yang mana benar. Makanya dibahas untuk dibetulkan. Mengenai dua fraksi yang keluar dari sidang, itu bukan kewenangan saya selaku bupati untuk mencampuri. Sebab sudah ada porsinya masing-masing. Yang jelas, jika ada kekeliruan akan kita perbaiki," tegas Bupati Norsan. (din)